

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2014

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 4 LEMBARAN KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4; 37 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- ABSTRAK - Bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat yang mengatur tentang golongan Retribusi perizinan tertentu belum diatur mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan pelaksanaan serta pengawasan, beberapa jenis Retribusi golongan perizinan tertentu yang telah diatur secara terpisah dalam Qanun tersendiri perlu dilakukan unifikasi dalam 1 (satu) qanun secara komprehensif. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b dan huruf c, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993, Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2006.

- Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan Retribusi, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Pemungutan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pemanfaatan, Peninjauan Tarif, Pemeriksaan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 Mei 2014.
 - Penjelasan 4 halaman